

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110 TAHUN 2007  
TENTANG  
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008;
- b. bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 pada tanggal 8 Oktober 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
  - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;

- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
- (3) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
  - b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

## Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh Daerah Provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh Kabupaten dan Kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13, gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan termasuk Sekretaris Desa.

## Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.

#### Pasal 4

- (1) Daerah yang mengalami penurunan alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2008 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari Dana Alokasi Umum Tahun 2007 dialokasikan Dana Penyeimbang Dana Alokasi Umum, sehingga total besaran alokasi Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Penyeimbang Dana Alokasi Umum menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Alokasi Umum Tahun 2007.
- (2) Daerah yang mengalami penurunan alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2008 lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Umum Tahun 2007, memperoleh Dana Alokasi Umum sesuai hasil dengan perhitungan berdasarkan formula.

#### Pasal 5

Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 17 (tujuh-belas) daerah pemekaran dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

#### Pasal 6

Rincian besarnya alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2007  
TANGGAL 6 DESEMBER 2007

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	557.327.156
1	Kab. Aceh Barat	303.463.871
2	Kab. Aceh Besar	407.951.536
3	Kab. Aceh Selatan	315.844.050
4	Kab. Aceh Singkil	161.827.728
5	Kab. Aceh Tengah	300.339.533
6	Kab. Aceh Tenggara	278.292.165
7	Kab. Aceh Timur	321.110.274
8	Kab. Aceh Utara	224.974.803
9	Kab. Bireun	381.776.850
10	Kab. Aceh Pidie	355.254.807
11	Kab. Simeulue	205.553.860
12	Kota Banda Aceh	307.002.315
13	Kota Sabang	184.666.362
14	Kota Langsa	215.308.983
15	Kota Lhokseumawe	233.315.427
16	Kab. Nagan Raya	272.684.736
17	Kab. Aceh Jaya	194.370.094
18	Kab. Aceh Barat Daya	226.924.281
19	Kab. Gayo Lues	226.715.878
20	Kab. Aceh Tamiang	237.708.404
21	Kab. Bener Meriah	223.797.261
22	Kota Subulussalam	87.981.636
23	Kab. Pidie Jaya	124.563.256
II	Provinsi Sumatera Utara	727.910.822
1	Kab. Asahan	422.761.735
2	Kab. Dairi	327.408.429
3	Kab. Deli Serdang	779.762.110
4	Kab. Tanah Karo	395.779.328
5	Kab. Labuhan Batu	578.103.405

6	Kab. Langkat	583.480.637
7	Kab. Mandailing Natal	394.434.140
8	Kab. Nias	393.414.349
9	Kab. Simalungun	639.593.433
10	Kab. Tapanuli Selatan	528.954.580
11	Kab. Tapanuli Tengah	290.589.335
12	Kab. Tapanuli Utara	338.051.601
13	Kab. Toba Samosir	252.143.902
14	Kota Binjai	276.422.519

halaman 3 tidak ada

10	Kota Bukit Tiggi	236.403.814
11	Kota Padang Panjang	192.699.289
12	Kota Padang	624.642.086
13	Kota Payakumbuh	234.690.661
14	Kota Sawahlunto	186.839.398
15	Kota Solok	205.820.702
16	Kota Pariaman	222.102.582
17	Kab. Pasaman Barat	305.576.071
18	Kab. Dharmasraya	246.604.954
19	Kab. Solok Selatan	213.109.223

IV	Provinsi Riau	198.375.199
----	---------------	-------------

1	Kab. Bengkalis	-
2	Kab. Indragiri Hilir	389.699.955
3	Kab. Indragiri Hulu	250.954.258
4	Kab. Kampar	244.763.763
5	Kab. Kuantan Singingi	291.388.945
6	Kab. Pelalawan	195.626.393
7	Kab. Rokan Hilir	-
8	Kab. Rokan Hulu	201.064.732
9	Kab. Siak	-
10	Kota Dumai	94.441.796
11	Kota Pekanbaru	344.111.454

V	Provinsi Riau Kepulauan	288.884.858
---	-------------------------	-------------

1	Kab. Bintan	108.583.054
2	Kab. Natuna	-
3	Kab. Karimun	200.573.387
4	Kota Batam	192.930.742
5	Kota Tanjung Pinang	188.537.170

6	Kab. Lingga	144.728.263
VI	Provinsi Jambi	468.803.682
1	Kab. Batanghari	260.698.423
2	Kab. Bungo	317.541.798
3	Kab. Kerinci	352.522.722
4	Kab. Merangin	339.161.139
5	Kab. Muaro Jambi	276.442.827
6	Kab. Sarolangun	273.178.987
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	230.401.141
8	Kab. Tanjun Jabung Timur	211.783.015
9	Kab. Tebo	280.043.871
10	Kota Jambi	370.324.986
VII	Provinsi Sumatera Selatan	545.776.133
1	Kab. Lahat	302.847.323
2	Kab. Musi Banyuasin	177.096.271
3	Kab. Musi Rawas	450.423.694
4	Kab. Muara Enim	399.913.302
5	Kab. Ogan Komering Ilir	510.395.426
6	Kab. Ogan Komering Ulu	329.680.459
7	Kota Palembang	716.129.540
8	Kota Pagar Alam	186.301.466
9	Kota Lubuk Linggau	210.989.638
10	Kota Prabumulih	180.935.827
11	Kab. Banyuasin	429.915.555
12	Kab. Ogan Ilir	288.510.604
13	Kab. OKU Timur	358.855.952
14	Kab. OKU Selatan	255.050.238
15	Kab. Empat Lawang	109.189.031
VIII	Provinsi Bangka Belitung	391.045.440
1	Kab. Bangka	280.703.630
2	Kab. Belitung	245.522.870
3	Kota Pangkal Pinang	239.742.242
4	Kab. Bangka Selatan	230.204.601
5	Kab. Bangka Tengah	205.620.247
6	Kab. Bangka Barat	228.461.981
7	Kab. Belitung Timur	220.654.059
IX	Provinsi Bengkulu	482.472.811
1	Kab. Bengkulu Selatan	267.650.140

2	Kab. Bengkulu Utara	378.637.998
3	Kab. Rejang Lebong	313.542.153
4	Kota Bengkulu	335.328.093
5	Kab. Kaur	200.861.633
6	Kab. Seluma	243.560.308
7	Kab. Mukomuko	223.756.452
8	Kab. Lebong	207.672.820
9	Kab. Kepahiang	214.515.588
X	Provinsi Lampung	570.533.930
1	Kab. Lampung Barat	325.662.015
2	Kab. Lampung Selatan	658.043.647
3	Kab. Lampung Tengah	669.102.531
4	Kab. Lampung Utara	440.124.311
5	Kab. Lampung Timur	529.485.333
6	Kab. Tanggamus	542.094.963
7	Kab. Tulang Bawang	450.771.445
8	Kab. Way Kanan	297.523.114
9	Kota Bandar Lampung	509.474.017
10	Kota Metro	208.068.039
XI	Provinsi DKI Jakarta	-
XII	Provinsi Jawa Barat	904.231.861
1	Kab. Bandung	1.001.542.069
2	Kab. Bekasi	525.365.565
3	Kab. Bogor	1.062.589.558
4	Kab. Ciamis	857.303.374
5	Kab. Cianjur	824.504.170
6	Kab. Cirebon	793.934.226
7	Kab. Garut	1.002.247.586
8	Kab. Indramayu	682.130.289
9	Kab. Karawang	689.521.993
10	Kab. Kuningan	586.883.974
11	Kab. Majalengka	600.795.435
12	Kab. Purwakarta	388.026.357
13	Kab. Subang	618.600.128
14	Kab. Sukabumi	827.153.453
15	Kab. Sumedang	608.993.532
16	Kab. Tasikmalaya	789.565.364
17	Kota Bandung	959.016.427
18	Kota Bekasi	590.144.385
19	Kota Bogor	397.366.563
20	Kota Cirebon	340.669.127

21	Kota Depok	427.136.387
22	Kota Sukabumi	278.943.833
23	Kota Cimahi	305.008.920
24	Kota Tasikmalaya	406.141.454
25	Kota Banjar	191.153.331
26	Kab. Bandung Barat	486.211.545
XIII	Provinsi Banten	342.743.861
1	Kab. Lebak	554.305.361
2	Kab. Pandeglang	580.209.734
3	Kab. Serang	675.626.751
4	Kab. Tangerang	774.453.991
5	Kota Cilegon	251.935.625
6	Kota Tangerang	445.217.401
XIV	Provinsi Jawa Tengah	1.053.491.871
1	Kab. Banjarnegara	488.707.563
2	Kab. Banyumas	702.152.351
3	Kab. Batang	401.574.876
4	Kab. Blora	478.260.120
5	Kab. Boyolali	571.498.221
6	Kab. Brebes	716.426.703
7	Kab. Cilacap	773.078.652
8	Kab. Demak	483.239.311
9	Kab. Grobogan	615.030.004
10	Kab. Jepara	505.641.495
11	Kab. Karanganyar	506.156.445
12	Kab. Kebumen	616.395.049
13	Kab. Kendal	490.895.234
14	Kab. Klaten	744.676.781
15	Kab. Kudus	460.540.680
16	Kab. Magelang	588.001.786
17	Kab. Pati	603.264.393
18	Kab. Pekalongan	465.324.091
19	Kab. Pemasang	577.864.687
20	Kab. Purbalingga	450.743.068
21	Kab. Purworejo	515.796.414
22	Kab. Rembang	398.410.703
23	Kab. Semarang	493.166.076
24	Kab. Sragen	551.265.965
25	Kab. Sukoharjo	498.935.688
26	Kab. Tegal	606.452.130
27	Kab. Temanggung	421.056.329
28	Kab. Wonogiri	598.932.854



29	Kab. Wonosobo	427.667.185
30	Kota Magelang	256.525.338
31	Kota Pekalongan	264.051.790
32	Kota Salatiga	225.384.715
33	Kota Semarang	634.864.459
34	Kota Surakarta	420.911.721
35	Kota Tegal	236.194.340
XV	Provinsi DI Yogyakarta	511.338.131
1	Kab. Bantul	583.169.351
2	Kab. Gunung Kidul	504.395.747
3	Kab. Kulon Progo	403.656.783
4	Kab. Sleman	592.594.528
5	Kota Yogyakarta	411.257.230
XVI	Provinsi Jawa Timur	1.022.860.627
1	Kab. Bangkalan	472.871.889
2	Kab. Banyuwangi	771.131.582
3	Kab. Blitar	634.378.020
4	Kab. Bojonegoro	586.814.115
5	Kab. Bondowoso	447.561.068
6	Kab. Gresik	532.824.783
7	Kab. Jember	942.532.809
8	Kab. Jombang	587.179.341
9	Kab. Kediri	682.047.289
10	Kab. Lamongan	599.292.383
11	Kab. Lumajang	537.879.076
12	Kab. Madiun	468.644.296
13	Kab. Magetan	490.163.947
14	Kab. Malang	967.647.192
15	Kab. Mojokerto	501.520.436
16	Kab. Nganjuk	580.060.073
17	Kab. Ngawi	544.877.704
18	Kab. Pacitan	406.718.314
19	Kab. Pamekasan	447.934.892
20	Kab. Pasuruan	599.547.875
21	Kab. Ponorogo	538.559.997
22	Kab. Probolinggo	531.084.756
23	Kab. Sampang	422.388.032
24	Kab. Sidoarjo	643.016.063
25	Kab. Situbondo	427.846.472
26	Kab. Sumenep	552.279.665
27	Kab. Trenggalek	465.748.300
28	Kab. Tuban	512.348.506

29	Kab. Tulungagung	628.424.932
30	Kota Blitar	217.165.721
31	Kota Kediri	400.161.615
32	Kota Madiun	266.187.291
33	Kota Malang	473.050.489
34	Kota Mojokerto	222.501.780
35	Kota Pasuruan	225.590.456
36	Kota Probolinggo	250.880.269
37	Kota Surabaya	713.590.304
38	Kota Batu	215.977.808
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	728.080.795
1	Kab. Bengkayang	294.565.246
2	Kab. Landak	349.350.696
3	Kab. Kapuas Hulu	516.445.842
4	Kab. Ketapang	556.986.638
5	Kab. Pontianak	531.738.803
6	Kab. Sambas	422.842.824
7	Kab. Sanggau	430.631.798
8	Kab. Sintang	538.389.211
9	Kota Pontianak	399.351.867
10	Kota Singkawang	254.513.508
11	Kab. Sekadau	245.122.479
12	Kab. Melawi	281.755.038
13	Kab. Kayong Utara	97.559.593
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	670.213.090
1	Kab. Barito Selatan	317.421.563
2	Kab. Barito Utara	301.648.592
3	Kab. Kapuas	481.573.934
4	Kab. Kotawaringin Barat	362.789.904
5	Kab. Kotawaringin Timur	443.628.586
6	Kota Palangkarya	330.018.672
7	Kab. Barito Timur	255.775.008
8	Kab. Murung Raya	379.056.673
9	Kab. Pulang Pisau	291.192.263
10	Kab. Gunung Mas	289.760.561
11	Kab. Lamandau	251.739.656
12	Kab. Sukamara	258.090.403
13	Kab. Katingan	378.084.107
14	Kab. Seruyan	340.561.127
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	466.549.205

1	Kab. Banjar	371.218.256
2	Kab. Barito Kuala	296.292.246
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	293.908.862
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	292.212.997
5	Kab. Hulu Sungai Utara	244.565.504
6	Kab. Kota Baru	347.623.085
7	Kab. Tabalong	247.998.722
8	Kab. Tanah Laut	277.759.677
9	Kab. Tapin	251.432.807
10	Kota Banjar Baru	203.334.205
11	Kota Banjarmasin	395.267.531
12	Kab. Balangan	185.712.462
13	Kab. Tanah Bumbu	239.834.121
XX	Provinsi Kalimantan Timur	126.228.861
1	Kab. Berau	300.855.826
2	Kab. Bulungan	206.124.288
3	Kab. Kutai Kartanegara	-
4	Kab. Kutai Barat	369.682.515
5	Kab. Kutai Timur	292.217.281
6	Kab. Malinau	403.558.269
7	Kab. Nunukan	145.618.382
8	Kab. Pasir	183.670.800
9	Kota Balikpapan	174.390.192
10	Kota Bontang	48.929.482
11	Kota Samarinda	283.660.270
12	Kota Tarakan	61.043.476
13	Kab. Penajam Paser Utara	33.092.046
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	532.916.167
1	Kab. Bolaang Mongondow	306.761.411
2	Kab. Minahasa	370.172.699
3	Kab. Sangihe	213.478.252
4	Kota Bitung	271.735.114
5	Kota Manado	430.073.269
6	Kab. Kepulauan Talaud	248.890.970
7	Kab. Minahasa Selatan	234.187.634
8	Kota Tomohon	204.066.920
9	Kab. Minahasa Utara	254.843.628
10	Kota Kotamobagu	79.200.163
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	76.993.427
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	97.010.264
13	Kab. Minahasa Tenggara	107.519.701

XXII	Provinsi Gorontalo	368.637.996
1	Kab. Boalemo	199.824.000
2	Kab. Gorontalo	272.770.367
3	Kota Gorontalo	256.963.926
4	Kab. Pohuwato	219.117.783
5	Kab. Bone Bolango	224.108.583
6	Kab. Gorontalo Utara	101.367.107
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	606.486.779
1	Kab. Banggai	431.119.584
2	Kab. Banggai Kepulauan	260.478.688
3	Kab. Buol	254.338.324
4	Kab. Toli-Toli	304.613.239
5	Kab. Donggala	502.872.835
6	Kab. Morowali	377.308.218
7	Kab. Poso	352.336.943
8	Kota Palu	349.457.013
9	Kab. Parigi Moutong	363.764.113
10	Kab. Tojo Una Una	247.185.257
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	656.709.523
1	Kab. Bantaeng	224.668.231
2	Kab. Barru	248.994.949
3	Kab. Bone	529.055.377
4	Kab. Bulukumba	363.390.164
5	Kab. Enrekang	252.233.180
6	Kab. Gowa	417.798.756
7	Kab. Jeneponto	296.146.274
8	Kab. Luwu	318.300.451
9	Kab. Luwu Utara	303.617.715
10	Kab. Maros	312.182.263
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	326.055.514
12	Kab. Pinrang	340.755.849
13	Kab. Selayar	242.376.729
14	Kab. Sidenreng Rappang	296.495.624
15	Kab. Sinjai	284.001.897
16	Kab. Soppeng	317.480.921
17	Kab. Takalar	294.665.014
18	Kab. Tana Toraja	396.158.732
19	Kab. Wajo	336.187.999
20	Kota Pare-pare	228.255.420
21	Kota Makassar	643.328.392
22	Kota Palopo	226.220.617

23	Kab. Luwu Timur	241.002.894
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	366.674.672
1	Kab. Malene	243.588.257
2	Kab. Mamuju	343.584.890
3	Kab. Polewali Mandar	335.303.018
4	Kab. Mamasa	214.348.008
5	Kab. Mamuju Utara	184.708.175
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	566.435.382
1	Kab. Buton	343.248.375
2	Kab. Konawe	336.799.188
3	Kab. Kolaka	376.492.765
4	Kab. Muna	340.333.723
5	Kota Kendari	325.337.878
6	Kota Bau-bau	254.108.450
7	Kab. Konawe Selatan	306.437.585
8	Kab. Bombana	217.289.824
9	Kab. Wakatobi	207.371.566
10	Kab. Kolaka Utara	237.031.195
11	Kab. Konawe Utara	116.805.580
12	Kab. Buton Utara	78.017.615
XXVII	Provinsi Bali	448.187.419
1	Kab. Badung	265.916.791
2	Kab. Bangli	262.885.446
3	Kab. Buleleng	504.733.624
4	Kab. Gianyar	385.187.683
5	Kab. Jembrana	304.078.636
6	Kab. Karangasem	349.814.538
7	Kab. Klungkung	276.182.564
8	Kab. Tabanan	416.172.072
9	Kota Denpasar	342.072.951
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	511.286.478
1	Kab. Bima	421.053.948
2	Kab. Dompu	284.521.612
3	Kab. Lombok Barat	479.217.729
4	Kab. Lombok Tengah	508.836.392
5	Kab. Lombok Timur	584.249.613
6	Kab. Sumbawa	416.380.064
7	Kota Mataram	301.817.302

8	Kota Bima	231.013.860
9	Kab. Sumbawa Barat	180.749.918

XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 616.601.854

1	Kab. Alor	284.632.877
2	Kab. Belu	379.987.048
3	Kab. Ende	307.599.052
4	Kab. Flores Timur	290.057.404
5	Kab. Kupang	401.642.447
6	Kab. Lembata	213.794.938
7	Kab. Manggarai	382.534.840
8	Kab. Ngada	164.113.937
9	Kab. Sikka	302.338.153
10	Kab. Sumba Barat	82.809.111
11	Kab. Sumba Timur	324.934.508
12	Kab. Timor Tengah Selatan	389.484.916
13	Kab. Timor Tengah Utara	285.796.603
14	Kota Kupang	313.887.875
15	Kab. Rote Ndao	199.093.092
16	Kab. Manggarai Barat	239.246.096
17	Kab. Nagekeo	147.783.312
18	Kab. Sumba Barat Daya	154.876.552
19	Kab. Sumba Tengah	95.372.848

XXX Provinsi Maluku 556.236.402

1	Kab. Maluku Tenggara Barat	419.791.404
2	Kab. Maluku Tengah	500.793.445
3	Kab. Maluku Tenggara	289.170.568
4	Kab. Pulau Buru	292.377.596
5	Kota Ambon	361.265.488
6	Kab. Seram Bagian Barat	241.073.749
7	Kab. Seram Bagian Timur	186.038.087
8	Kab. Kepulauan Aru	219.698.360

XXXI Provinsi Maluku Utara 451.481.459

1	Kab. Halmahera Tengah	203.031.320
2	Kab. Halmahera Barat	219.556.721
3	Kota Ternate	245.930.849
4	Kab. Halmahera Timur	205.692.272
5	Kota Tidore Kepulauan	215.237.280
6	Kab. Kepulauan Sula	261.290.724
7	Kab. Halmahera Selatan	300.565.063
8	Kab. Halmahera Utara	276.125.863

XXXII Provinsi Papua 1.002.431.825

1	Kab. Biak Numfor	317.334.041
2	Kab. Jayapura	421.254.250
3	Kab. Jayawijaya	369.230.697
4	Kab. Merauke	647.518.006
5	Kab. Mimika	237.570.131
6	Kab. Nabire	423.565.995
7	Kab. Paniai	442.609.847
8	Kab. Puncak Jaya	388.175.029
9	Kab. Yapen Waropen	256.826.101
10	Kota Jayapura	331.616.963
11	Kab. Sarmi	304.314.857
12	Kab. Keerom	296.638.388
13	Kab. Yahukimo	392.591.383
14	Kab. Pegunungan Bintang	350.990.794
15	Kab. Tolikara	312.393.431
16	Kab. Boven Digoel	449.094.135
17	Kab. Mappi	412.597.444
18	Kab. Asmat	407.080.185
19	Kab. Waropen	173.817.345
20	Kab. Supiori	202.666.741
21	Kab. Mamberamo Raya	366.341.146

XXXIII Provinsi Papua Barat 578.084.261

1	Kab. Sorong	272.373.321
2	Kab. Manokwari	334.244.601
3	Kab. Fak Fak	378.324.359
4	Kota Sorong	238.950.947
5	Kab. Sorong Selatan	418.028.618
6	Kab. Raja Ampat	296.123.511
7	Kab. Teluk Bintuni	344.624.945
8	Kab. Teluk Wondama	236.404.458
9	Kab. Kaimana	361.449.597

Total Provinsi 7.950.714.489

Total Kabupaten/Kota 161.556.430.382

Total Nasional 179.507.144.871

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO